

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

AJENG DYAH WAHYUNI



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ONLINE DRIVING LICENSE PROGRAM AT BANDAR LAMPUNG RESORT CITY POLICE

By

AJENG DYAH WAHYUNI

Driving License (SIM) is one of the administrative records that must be owned by motorists both two wheels and four wheels. Requirements necessary to obtain a driving license has been getting easier. However, these requirements apply only to residents of the area who have identity card (KTP) native to the area inhabited, while for the immigrant population that is not possible because it must create a new ID card to take care of the renewal or driver's license. Finally, the Online driving license is a solution to these problems so as to simplify the bureaucracy in the making or a driving license renewal.

In this study, researchers wish to put a picture of the processes and inhibiting factors the adoption of SIM Online program implemented in Bandar Lampung Police. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques used in this research is by interview, documentation and observation. Data were analyzed using data reduction techniques and technical validity of the data using triangulation techniques.

The results of the research phase of the program describe the SIM Online start from socialization from the Police to the public, registration, driver's license exam to the SIM process is finished printing. In practice, there are still some constraints affecting the effectiveness of the program as people who do not know of any SIM Online include network used to access the server Ministry of Internal Affairs is not adequate and lack of data on the applicant's driver's license on the server Ministry of Internal Affairs. The readiness of the implementing agency in terms and consistent socialization is also necessary to provide knowledge to the community, especially migrant citizen about the Online SIM program.

Keywords: Implementation, SIM Online, Bandar Lampung Police.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SIM *ONLINE* PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AJENG DYAH WAHYUNI

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu berkas administrasi yang wajib dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus SIM tersebut sudah semakin mudah. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk warga daerah yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) asli daerah yang ditinggali, sedangkan untuk warga pendatang hal tersebut sangat tidak memungkinkan karena harus membuat KTP baru untuk mengurus perpanjangan atau pembuatan SIM tersebut. akhirnya program pembuatan SIM secara *Online* menjadi solusi atas permasalahan tersebut sehingga dapat mempermudah birokrasi dalam pembuatan maupun perpanjangan SIM.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengemukakan gambaran mengenai proses dan faktor penghambat dalam penerapan program SIM *Online* yang dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data dan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menggambarkan tahapan pelaksanaan program SIM *Online* mulai dari sosialisasi dari pihak Polri kepada masyarakat, pendaftaran, proses ujian SIM hingga SIM tersebut selesai dicetak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program tersebut seperti masyarakat yang belum mengetahui adanya program SIM *Online* tersebut meliputi jaringan yang digunakan untuk mengakses server Kemendagri yang belum memadai serta kurangnya data pemohon SIM pada server Kemendagri. Kesiapan aparat pelaksana serta sosialisasi yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama warga pendatang mengenai program SIM *Online* tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, SIM *Online*, Polresta Bandar Lampung.

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

AJENG DYAH WAHYUNI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA
POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ajeng Dyah Wahyuni**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041005

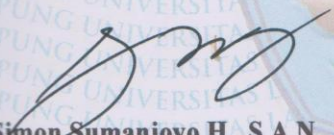
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



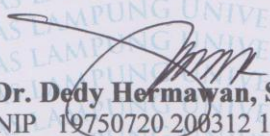
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Simon Sumanjyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003



Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A.

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.** 

Sekretaris : **Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA.** 

Penguji Utama : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.** 



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Maret 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 2 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Ajeng Dyah Wahyuni
NPM. 1216041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ajeng Dyah Wahyuni, lahir di Bandar Lampung pada 7 Juni 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Surono dan Ibu Nuraini. Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tamansiswa Teluk Betung yang diselesaikan pada tahun 2000. Selanjutnya pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tamansiswa Teluk Betung diselesaikan tahun 2006. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2015 dipertengahan bulan juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sukaraja, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur selama 60 hari.

MOTTO

Jangan kehilangan keyakinan, tetap berdoa dan berusaha

(Ajeng Dyah Wahyuni)

Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan
menjadi orang yang terbaik

(Annonymous)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga

Saya

dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Kedua Orang Tua Saya

Bapak Surono dan Ibu Nuraini

yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi

yang tiada henti-hentinya.

Adik dan seluruh keluarga besar serta saudara-saudaraku tercinta

Dan untuk seseorang yang selalu memberikan supportnya,

terima kasih.

untuk semua sahabat – sahabat saya dan

teman – teman seperjuangan saya terimakasih telah banyak membantu

saya dalam suka maupun duka.

Serta, Almamaterku Universitas Lampung yang kucintai.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga akhirnya Skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Surono dan Ibu Nuraini tercinta yang selalu mendoakan setiap saat, mendidik, memberikan motivasi, semangat dan support agar penulis dapat menjadi orang yang sukses dan berguna.

Terima kasih untuk doa, kasih sayang dan segala yang telah kalian berikan, semoga ajeng bisa buat bangga dan bahagiain ibu bapak.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung terimakasih atas saran dan masukan serta arahnya selama ini.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.PA. Selaku dosen Pembimbing Utama, Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan yang selalu Bapak berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Izzul Fachtu Reza S.A.N, M.PA. Selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas bimbingannya, saran, nasihat, arahan dan waktu selama proses bimbingan penulis sangat terbantu.
7. Bapak Nana Mulyana S.IP, M.Si. Selaku dosen pembahas dan penguji , Terima kasih atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari bapak.

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.
10. Rezky Prabowo adik saya satu-satunya yang menjengkelkan dan selalu cuek. Selalu semangat dan yang rajin ya dek, supaya cita-citanya tercapai menjadi penurus bapak. Kita buat bapak dan ibu bangga.
11. Untuk best partner yang selalu hadir dan banyak membantu dalam keadaan susah maupun senang dihidup saya, yang selalu direpotin, yang selalu mendukung, memberi motivasi, nasehat, doa dan dukungan bahkan mendampingi penulis selama berproses dari awal perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan Skripsi ini, maafin aku yang terlalu moody dan gak sabaran, terima kasih sudah mau direpotkan, terima kasih best partner ever Aliyus Pratama, A.Md semoga kita bisa sukses bersama.
12. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku kakek nenek, pakde bude, om tante, sepupu sepupu tercinta, ini jawaban atas segala doa dan pertanyaan kalian.
13. Kepada Sahabatku tercinta yang sudah seperti keluarga Widya puspita Sari, S.E jangan lupa langsing kak jodohmu sudah dekat, Levina Rachmawati Putri, S.E jangan lupa ilangin lemotnya kak, Rena Rezita semoga jadi bu guru yang baik ya kak (S.Pd nya soon), serta Cahyo Rendy

Wicaksono, S.Kom semoga makin amanah ya gan, Terima Kasih untuk selalu selalu menghibur, memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, kalian yang selalu ada, kalian yang selalu bikin ketawa sampe nangis, kalian yang tergokil , semoga kita bisa jadi orang sukses, semoga kita akan selalu seperti ini selamanya, 8 years and still counting guys big love.

14. Sahabat peratamaku saat masuk kuliah Merie Larasati terimakasih sudah membagi suka dan duka selama kita kuliah, semoga pertemanan kita akan terus berlanju, sukses terus ya mer. Team KKN Rumpi saat di Sukaraja, Rian Apriyanti, Dertiana, Arizka Antartika, Marcella Taweru, Arum Asterini, Hanafi. Terima kasih buat pengalaman 60 hari yang indah, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun semoga hubungan kita terus berlanjut.
15. Teman-teman seperjuangan ANE 012 Anisa, Novaria, Serliani, Purnama, Azizah, Diannisa, Putri Wijayanti, Ayu Septiani, Rhani Umi, Silvia Tika, Ihsan, Bagus, Bayu, Taufik, Akbar, Berry, Hamdani, Firdaus dan semua teman-teman ane 012 yang tak bisa tertulis satu persatu, terima kasih untuk saling berbagi ilmu dan waktu kalian. Semangat skripsi.
16. Keluarga Besar Ampera, terima kasih untuk semua cerita yang telah kalian lukiskan selama ini. Saya merasa bahagia kenal kalian karena kehadiran serta canda tawa kalian semua. Terima kasih juga buat kebersamaan terindah yang telah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini takkan pernah terlupakan, semoga kita semua menjadi orang sukses.

17. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya belajar di Universitas Lampung. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mungkin tidak dapat penulis balas secara langsung. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang akan membalas semua kebaikan dan ketulusan hati mereka dengan balasan yang lebih indah dan lebih baik dari-Nya. Amin.

Bandar Lampung, Maret 2017

Ajeng Dyah Wahyuni

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SAN WACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	12
3. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	13
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	15
1. Konsep Implementasi Kebijakan	15
2. Model-model Implementasi Kebijakan.....	17
3. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan	23
C. Tinjauan Tentang Faktor Pendukung Keberhasilan Kebijakan	24
D. Tinjauan Tentang SIM <i>Online</i>	27
E. Kerangka Pikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Teknik Keabsahan Data	40

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	43
1. Sejarah singkat Polresta Bandar Lampung	43
B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung.....	45
1. Visi Polresta Bandar Lampung tahun 2016	45
2. Misi Polresta Bandar Lampung tahun 2016.....	45
3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung	46
4. Tugas dan Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung	47
5. Sasaran prioritas Satlantas Polresta Bandar Lampung.....	48

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Implementasi program SIM <i>Online</i> pada Polresta Bandar Lampung ..	54
a. Komunikasi	55
b. Sumber Daya.....	62
c. Disposisi.....	67
d. Struktur Birokrasi.....	69
B. Pembahasan Implementasi program SIM <i>Online</i> pada Polresta Bandar Lampung	75
1. Komunikasi	75
2. Sumber Daya.....	78
3. Disposisi.....	79
4. Struktur Birokrasi.....	81
C. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi program SIM <i>Online</i> pada Polresta Bandar Lampung	82
1. Gangguan Jaringan.....	82
2. Data Pemohon yang belum ter-update di server kemendagri	83
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang SIM <i>Online</i>	83

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jumlah Pengguna Jasa pembuatan dan perpanjangan SIM di Satpas Polresta Bandar Lampung..... 6
Tabel 2	Daftar Informan Peneliti..... 36
Tabel 3	Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang teluk Betung..... 43
Tabel 4	Skturktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 46
Tabel 5	Sarana dan Prasarana pelaksanaan SIM Online..... 65
Tabel 6	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban SIM <i>Online</i> di Satpas 2526 Polresta Bandar Lampung..... 70

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle.....	21
Gambar 2	Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier.....	22
Gambar 3	Bagan Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4	Surat Telegram Pelaksanaan SIM Online.....	59
Gambar 5	Informasi SIM Keliling pada akun instagram @satlantaspolrestabalam.....	62
Gambar 6	Ruang Rekam Foto dan Cetak.....	66
Gambar 7	Fasilitas Mobil SIM Keliling.....	66
Gambar 8	Loket Pendaftaran dan Verifikasi berkas.....	71
Gambar 9	Ruang Ujian Teori.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menaati hukum, salah satunya adalah ketertiban berkendara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki dan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi (kemampuan) seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor dan

juga sebagai registrasi data pengemudi kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian.

Golongan SIM berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibagi menjadi SIM umum dan SIM perseorangan.

Pasal 80 Undang-Undang tersebut, SIM perseorangan terbagi menjadi:

- a. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
- b. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
- c. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
- d. SIM C, untuk mengemudikan sepeda motor.
- e. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Di Indonesia, pihak yang menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Setiap calon pengemudi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian untuk dapat memperoleh SIM yang diinginkan. Penyelenggaraan administrasi SIM telah dilakukan Polri sejak lima puluh tahun yang lalu hingga saat ini dalam kurun waktu lebih dari setengah abad. Dengan demikian, masyarakat telah memahami bahwa polri merupakan satu-satunya instansi yang mengeluarkan SIM.

Seiring dengan perkembangan zaman di era reformasi pada segala bidang, pelayanan polisi lalu lintas kepada masyarakat dalam penerbitan SIM dituntut lebih profesional, prosedural, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan negatif di masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya Polisi lalu lintas yang akan mewakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi SIM sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan.

Masyarakat sudah dipermudah dalam pembuatan dan perpanjangan SIM yang hampir habis masa berlakunya. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga daerah yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) asli daerah yang ditinggali, sedangkan untuk warga pendatang hal tersebut sangat tidak memungkinkan karena harus membuat KTP baru untuk mengurus perpanjangan atau pembuatan SIM tersebut. Mutasi SIM dilakukan saat seseorang akan perpanjang masa belaku SIM tidak ditempat asal SIM dibuat. Menurut Juvianto Sirait selaku Teknisi SIM *Online* bahwa:

“Syarat-syarat yang perlu disiapkan untuk perpanjangan SIM bagi warga pendatang yaitu pertama minta surat pengantar mutasi dari Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) yang menerbitkan SIM lama, KTP asli tempat tinggal baru, SIM asli yang masih berlaku, sama surat keterangan sehat dari dokter.” (*hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016*)

Dalam persyaratan tersebut, warga pendatang harus meminta surat pengantar dari daerah asal diterbitkannya SIM tersebut. Hal tersebut memberatkan bagi perantau yang bekerja di daerah lain karena harus kembali ke daerahnya untuk sementara

waktu hanya untuk mengurus surat pengantar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru dalam memberikan pelayanan SIM tersebut sehingga dapat mempermudah masyarakat pengguna jasa.

Inovasi pelayanan publik dapat dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. (Sumber: <http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223> diakses pada tanggal 28 Juli 2016 Pukul 19.00 WIB).

Untuk menciptakan inovasi tersebut, Polri selaku pihak yang berwenang dalam membuat SIM meluncurkan program Layanan SIM *Online*. Layanan SIM *Online* maksudnya adalah bahwa seluruh data pemilik SIM sudah terkoneksi secara *Online* di seluruh Indonesia dengan proses komputerisasi, data yang telah dimuat akan langsung terhubung ke *server* Korlantas Polri dan Kementerian Dalam Negeri yang akan langsung mengetahui seluruh data pemilik SIM tersebut jika memiliki *e-KTP* dalam melakukan registrasi sehingga dapat diakses dari mana pun di wilayah Indonesia.

Program SIM *Online* di-*launching* secara bersamaan di 45 Kepolisian Resor Kota (Polresta) se-Indonesia. Dari keseluruhan polres yang ada di Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung merupakan satu-satunya polres yang menyediakan *excellent service* SIM *Online* yang diselenggarakan secara nasional. *Launching* secara resmi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada

tanggal 06 Desember 2015. Polresta Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang melaksanakan program *SIM Online*, mengadakan *launching* di sekitar tugu adipura, kota Bandar Lampung. Layanan *SIM Online* ini baru diterapkan hanya untuk perpanjangan SIM. Meskipun demikian, ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum perantau. Karena dengan fasilitas *SIM Online* ini, berarti pemilik SIM yang tinggal di luar daerah asalnya atau kebetulan sedang berada di luar kota saat SIM-nya habis masa berlakunya, sekarang sudah tidak perlu lagi mengurus perpanjangan SIM di daerah asal sesuai dengan *e-KTP* yang bersangkutan melainkan bisa mengurusnya dimana pun, *SIM Online* ini sudah berlaku untuk semua SIM dan untuk sementara baru ada 45 Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) di ibukota provinsi seluruh Indonesia untuk tahap pertama. Di Lampung sendiri baru di Polresta Bandar Lampung dan sudah mulai ada di mobil SIM keliling Polresta. Menurut Juvianto Sirait selaku Teknisi *SIM Online* bahwa:

“Selain di mobil SIM keliling Polresta, layanan *SIM Online* sudah di coba dicorner SIM namun tidak dapat terlaksana, sehingga seluruh peralatan pembuatan *SIM Online* tersebut dicabut kembali karena peralatannya yang masih kurang memadai untuk melakukan pembuatan *SIM Online*.” (*hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016*)

Sejak diresmikan, Layanan *SIM Online* ini sudah banyak yang melakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan data mengenai jumlah pengguna jasa pembuatan dan perpanjangan SIM yang dilakukan di Satpas Polresta Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Jumlah pengguna jasa Pembuatan dan Perpanjangan SIM di Satpas Polresta Bandar Lampung

No	Golongan SIM	Baru	Perpanjangan	Pengalihan Golongan	Penggantian Hilang/Rusak	Penerbitan akibat pencabutan	Total
1	A	586	2081	36	13	0	2716
2	A Umum	0	0	0	0	0	0
3	B1	0	27	3	0	0	30
4	B1 Umum	0	214	0	0	0	214
5	B2	0	1	0	0	0	1
6	B2 Umum	0	144	1	0	0	145
7	C	792	4147	0	23	0	4962
8	D	0	0	0	0	0	0
Total		1378	6614	40	36	0	8068

Sumber: Laporan Rekapitulasi Produksi SIM Oktober 2015 s/d 19 Februari 2016

Berdasarkan data diatas, persentase pengguna jasa pembuatan dan perpanjangan SIM selama kurang lebih tiga bulan setelah diresmikannya SIM *Online* hingga saat ini, pemohon diluar Bandar Lampung yang menggunakan SIM *Online* baru sekitar 10 persen dan sisanya masih masyarakat Bandar Lampung, akibat dari masih kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Polresta Bandar Lampung.

Layanan perpanjangan SIM juga sudah terintegrasi dengan *e-KTP*, sehingga data pemohon dapat di *crosscheck* melalui komputer yang sudah *Online* dengan database *e-KTP* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polres penerbit SIM, sehingga tidak akan ada SIM ganda yang beredar. Batas melakukan perpanjangan SIM *Online* dua minggu sebelum masa aktif berakhir sampai tiga bulan setelah masa berlaku habis, jika sudah melewati batas tersebut pemohon harus membuat SIM baru.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang dialami saat pelaksanaan SIM *Online* tersebut seperti yang dikutip dari pernyataan Teknisi SIM *Online* Juvianto Sirait (Tribun Lampung 3 Desember 2015) yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini pelaksanaan perangkat SIM *Online* berjalan lancar sesuai fungsinya. Hanya saja kendala yang terjadi ada pada jaringan yang terhubung dengan Korlantas Polri. Sebab, terkadang jaringan internet lambat. Namun secara keseluruhan berjalan dengan baik.”
(lampung.tribunnews.com/2015/12/03/pembuatan-sim-Online- sementara-hanya-berlaku-bagi-warga-bandar-lampung diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 15.00 WIB)

Dari pernyataan tersebut, kendala yang dihadapi oleh teknisi SIM *Online* di Polresta Bandar Lampung diantaranya jaringan internet yang lambat sehingga hal tersebut menghambat jaringan dengan Korlantas Polri. Kendala tersebut dialami juga oleh petugas pelayanan SIM *Online* yang ada di fasilitas mobil SIM keliling seperti yang disampaikan oleh Brigpol Dani dan Brigpol Febri salah satu petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung (Dalam Saibumi.com tanggal 14 Desember 2015) yaitu:

"Permasalahannya ya kayak gini kalau di SIM *Online* kan kita kerjasama Disduk Capil, penyedia jaringan dan telkom. Kalau jaringan tidak terhubung ke mabes, kita tidak bisa melaksanakan apa-apa terpaksa kita harus masukin ke manual bukan yang *Online* karena jaringan bermasalah," terang Dani.

Brigpol Febri menambahkan jika pemohon berasal dari luar kota Bandar Lampung dan jaringan bermasalah, ia menyuruh pemohon untuk kembali ke rumah dan melanjutkannya keesokan hari. "Ya kalau lagi masalah jaringan kayak gini, terpaksa kita suruh pulang. Besok bisa dateng lagi,"
(<http://www.saibumi.com/artikel-70970-pelayanan-sim-Online-setiap-hari-di-mobil-keliling-hanya-50-pemohon.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 15.10 WIB)

Dari kedua berita di atas, terlihat bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh petugas perpanjangan SIM *Online* tersebut adalah permasalahan koneksi internet yang kurang memadai. Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak satlantas Polresta Bandar Lampung membuat masih kurangnya warga masyarakat yang menggunakan pelayanan perpanjangan SIM secara *Online* tersebut.

Dalam setiap implementasi sebuah program, sarana dan prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya implementasi tersebut. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal ini, program SIM *Online* yang diterapkan oleh Polresta Bandar Lampung sangat membutuhkan koneksi internet yang baik agar kegiatan perpanjangan sim tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi dan kendala-kendala dari kebijakan SIM *Online* tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi: **Implementasi Program SIM *Online* Pada Polresta Bandar Lampung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program SIM *Online* Pada Polresta Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai implementasi program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara, terutama tentang studi implementasi kebijakan publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi Satlantas Polresta Bandar Lampung terkait dalam pelaksanaan program SIM *Online* serta masyarakat pengguna jasa layanan publik tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Chief dalam Abdul Wahab (2005:5), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Nugroho (2008:54), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Thomas dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

jugamerupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

David Easton dalam Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*The authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*Authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42) sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu: “Para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:42) menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:14-15), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan terkait dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing *actor* akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi iniberbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapaimplementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana(*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentangoleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan.

Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dirangkum oleh Agustino (2006:54) adalah sebagai berikut :

a. ***Bardach*** dalam Agustino(2006:54)

Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang.

b. **Van Metter dan VanHorn** dalam Agustino (2006:139)

Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

c. **Mazmanian dan Sabatier** dalam Agustino (2006:139)

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badanperadilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasikebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu:

1. adanya tujuan atau sasarankebijakan
2. adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. adanya hasilkegiatan

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan olehLester dan Stewart dalam Agustino (2006:139), bahwa implementasi sebagai suatuproses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. (Agustino, 2006:139)

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Grindle (1980: 15) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa model dibawah ini dikembangkan oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa saja bentuk (jenis) implementasi kebijakan, apa-apa saja variabelnya serta syarat-syarat agar implementasinya bisa menjadi berhasil secara sempurna.

2. 1. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975:447) disebut dengan “*A Model of the Policy Implementation.*” Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perencanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya Keberhasilan
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Meter dan Horn, 1975:462-478)

2. 2. Model George Edward III

Model implementasi kebijakan selanjutnya di kembangkan oleh George Edward III dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan

bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan (<http://mulyono.staff.uns.ac.id/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2012 pukul 14.41).

Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward dalam Tangkilisan (2003:12-13) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

2. Sumber daya

Sumber – sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber – sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber – sumbernya adalah : staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor untuk mensukseskan kebijakan.

3. Disposisi

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

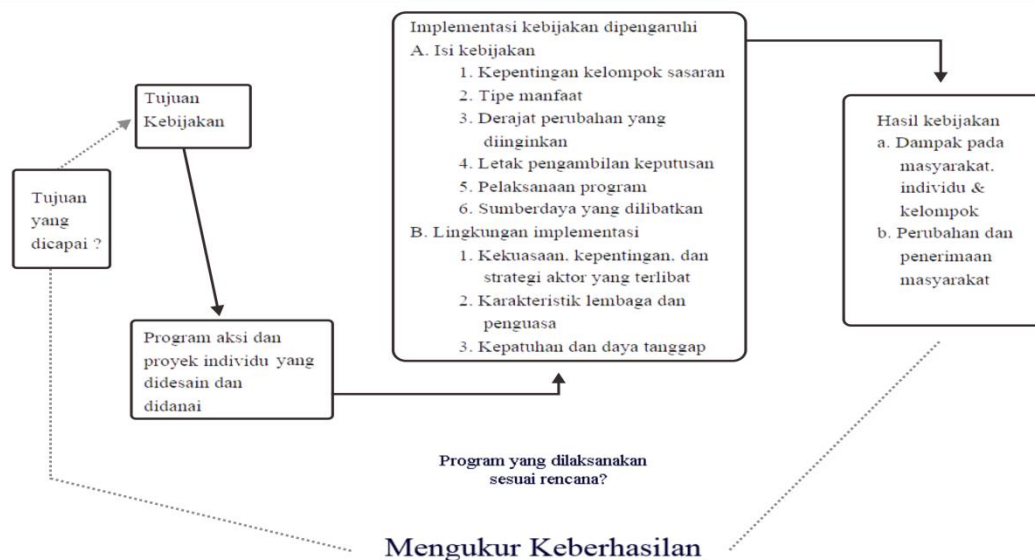
2. 3. Model Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005: 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Menurut Subarsono (2005: 93) Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) apakah letak sebuah program sudah tepat;
- 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- 6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Gambar 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Sumber: Grindle dalam Subarsono (2005:93)

2. 4. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94) dan Tilaar dan Nugroho (2008:215), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi :

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*).

Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 95-96): “

- (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
- (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
- (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)

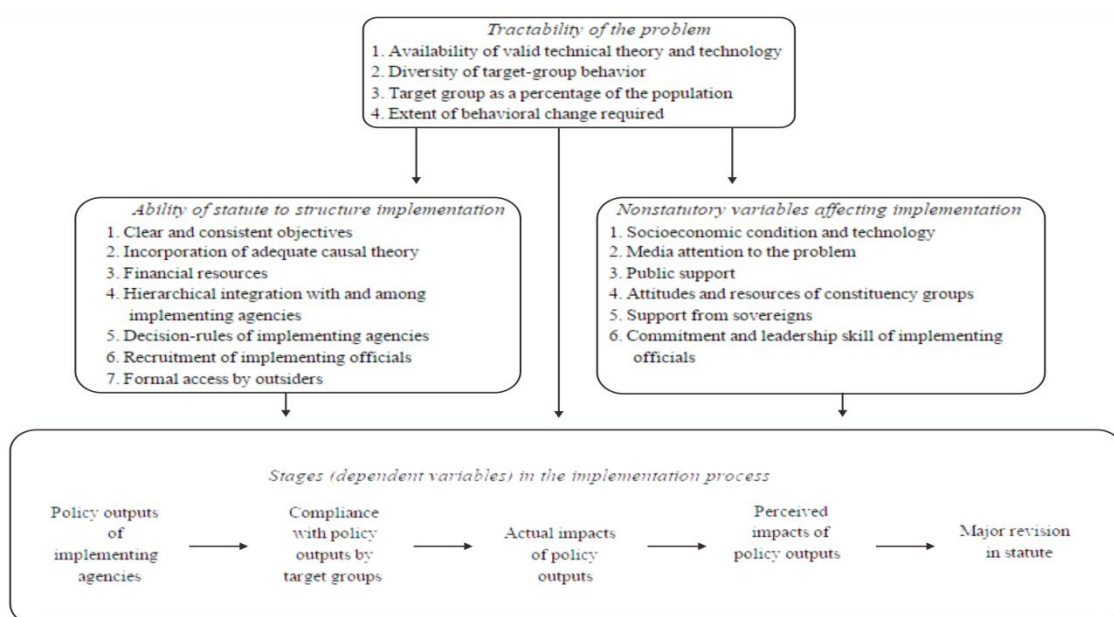
Kategori *nonstatutory variables affecting implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 98-99).”

(1) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

(2) Dukungan publik terhadap kebijakan

(3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)

(4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.



Gambar 2.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier

Sumber: Daniel Sabatier dalam Hill (1997: 274)

Berdasarkan penjelasan berbagai ahli mengenai model implementasi, peneliti menggunakan model implementasi dari Edward III, karena implementasi SIM

Online tersebut mempunyai karakteristik *top down* yang sesuai dengan tipe Edward III.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan berada pada tahap implementasi atau pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, termasuk di dalamnya unsur lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Ripley dan Franklin(1986:89) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakanatau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level beraucrats* terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”.

(Ripley dan Franklin, 1986:89)

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut.

Kemudian sebaliknya Jam Marse (Dalam Solichin, 1997:19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

(Solichin, 1997:19)

C. Tinjauan Tentang Faktor Pendukung Keberhasilan Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka Geogre Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi (Edward III, 1980:10) yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)

“the first requitment for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally,these communications need to be accurate and they must be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication” (Edward III, 1980:17)

Menurut pengertian George C. Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. *Resources* (Sumber Daya)

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the resources to do an affective job,implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise;relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation:the authority to ensure that policies are carried out as they intended;and facilities (including builidings,equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provide,and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53)

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut Edward sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

3. *Dispositions* (Disposisi)

“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies themselves. The way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests”. (Edward III, 1980:89)

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan inginefektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau cirri-ciri dari para actor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi. Jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika prespektif dan tingkah laku para pelakana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

4. *Bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi)

“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. The former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the

operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia” (Edward III, 1980:125)

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

D. Tinjauan Tentang SIM Online

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Pada dasarnya, surat izin mengemudi biasa maupun *Online* tidak memiliki perbedaan. perbedaan antara sim konvensional dan SIM *Online* terdapat pada sumber data yang digunakan sebagai acuan. pembuatan SIM konvensional hanya dapat diperpanjang di daerah asal pembuatan sim tersebut sedangkan SIM *Online* menggunakan sumber data yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pengguna sim *Online* dapat memperpanjang SIM tersebut walaupun sedang tidak berada di daerah asal pembuatan SIM tersebut.

E. Kerangka Pikir

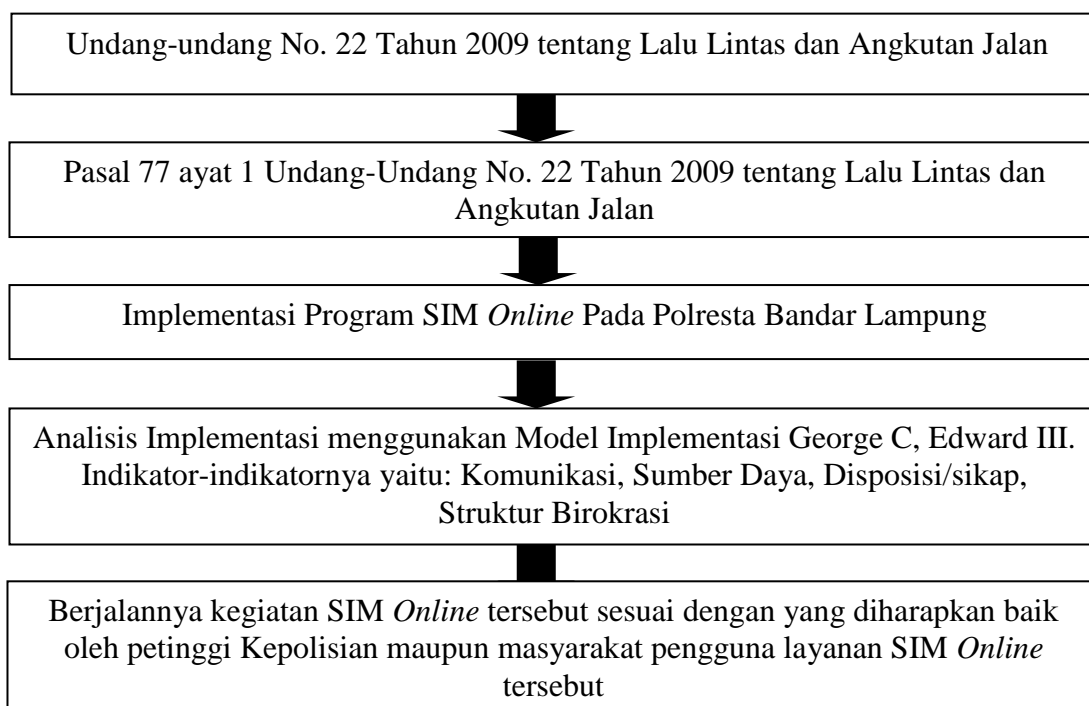
Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan yang berlaku baik dalam kelengkapan dasar berkendara termasuk kelengkapan administrasi berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan adanya SIM, seseorang telah dianggap menjadi suatu wajib hukum yang taat hukum, sehingga dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM merupakan bukti administratif bahwa seseorang tersebut sudah terikat oleh hukum, terutama hukum dalam berkendara. Pembuatan SIM dapat dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres yang ada di daerah pengendara kendaraan bermotor tersebut. Namun terdapat kendala dalam pelayanan pembuatan SIM tersebut karena pengendara harus membuat atau memperpanjang SIM tersebut hanya di daerah asal sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi perantau yang sedang tidak di daerah asalnya namun membutuhkan pelayanan pembuatan atau perpanjang SIM tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan pembuatan SIM dituntut agar dapat mempermudah pengguna dalam membuat atau memperpanjang SIM tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri selaku pihak yang berwenang dalam membuat SIM meluncurkan program layanan SIM *Online*. Layanan tersebut dapat mempermudah warga perantau yang akan membuat atau memperpanjang SIM tetapi sedang tidak berada di tempat asalnya sehingga dapat menggunakan layanan tersebut tanpa perlu menunggu kembali ke daerah asal.

Untuk menganalisis pelaksanaan program SIM Online tersebut, peneliti menggunakan model Implementasi George C, Edward III. Adapun indikator-indikator yang digunakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap, dan Struktur Birokrasi.

Dari temuan dilapangan peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM *Online* tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga sebagian warga masyarakat belum mengetahui program tersebut, sedangkan hal lain yang menjadi kendala yaitu permasalahan koneksi internet yang digunakan untuk mengakses data dari server Kemendagri sehingga menghambat proses pelayanan SIM *Online* tersebut.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti akan menggambarkan skema kerangka konsep dalam kaitannya dengan program SIM *Online* di Polresta Bandar Lampung agar dapat mempermudah arah penelitian dan penelitian skripsi ini.



Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007:4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif mendeskripsikan fenomena yang dipelajari dan akan menguraikan hasil pengamatan untuk sampai pada kesimpulan. Metode penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan sifat yang tetap melainkan bersifat interpretif. Komunikatornya bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan bebas dan perilaku (komunikasi) secara internal dikendalikan oleh individu

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu karakteristik dalam suatu deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian tersebut untuk menggambarkan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung mengenai program *SIM Online*.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan sebagai faktor untuk memperdalam penelitian. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus.

Menurut Moleong (2000:237), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap di lakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Adapun fokus penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *SIM Online* pada Polresta Bandar

Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edward III. Indikator-indikator tersebut yaitu:

1. Komunikasi, terdiri dari:
 - a. Transmisi; penyaluran pesan ke personil yang tepat, diukur dengan indikator Ketepatan penunjukan pihak-pihak penanggungjawab dalam kebijakan *SIM Online* tersebut. perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus ditransmisikan kepada personil yang tepat sebelum perintah tersebut diikuti.
 - b. Kejelasan pesan yang diukur dengan indikator: Kejelasan perintah agar personel Satlantas Polresta Bandar Lampung dapat melaksanakan program *SIM Online* tersebut sesuai yang diinginkan petinggi Polri. perintah implementasi bukan hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Jika perintah tersebut tidak jelas maka implementor akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan dan mereka akan melakukan diskresi untuk menafsirkan pandangan mereka sendiri terhadap implementasi kebijakan.
 - c. Konsistensi pesan, diukur dengan indikator: Konsistensi perintah untuk melaksanakan program *SIM Online* tersebut. keputusan yang saling bertentangan akan membingungkan dan membuat frustrasi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
2. Sumber daya, terdiri dari:
 - a. Staf /personil, diukur dengan indikator:

1. Kecukupan jumlah personil pelaksana program *SIM Online*.
kekurangan jumlah staf merupakan penghambat dalam implementasi kebijakan.
 2. Kemampuan *technical support* dalam menangani pelaksanaan program *SIM Online* tersebut. semakin teknis suatu kebijakan maka kebijakan tersebut makin membutuhkan staf yang makin terspesialisasi.
- b. Informasi, diukur dengan indikator: Kecukupan informasi tentang bagaimana menggunakan fasilitas *SIM Online* tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan menyebabkan tertundanya pelaksanaan atau bahkan kebuntuan.
 - c. Kewenangan, diukur dengan indikator: Kecukupan formalitas berupa Surat Keputusan dari petinggi Polri terkait perintah pelaksanaan program *SIM Online* tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam indikator ini adalah implementor tidak memiliki kewenangan, atau implementor memiliki kewenangan tapi terbatas.
 - d. Fasilitas, diukur dengan indikator: Kecukupan fasilitas untuk mengimplementasikan program *SIM Online*. Kurangnya bangunan, peralatan, suplai, atau tanah dapat menghalangi implementasi kebijakan.
3. Disposisi, yaitu sikap dari petugas pelaksana kebijakan *SIM Online* Polresta Bandar Lampung terhadap program *SIM Online* tersebut.
 4. Struktur Birokrasi, terdiri dari dua karakteristik yaitu:
 - a. *Standard Operating Procedures* (SOPs), yaitu mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan

dan tanggung jawab dalam implementasi program SIM *Online* di Polresta Bandar Lampung.

b. pelaksanaan fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja oleh pelaksana dalam implementasi program SIM *Online* di Polresta Bandar Lampung.

5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program SIM *Online* di Polresta Bandar Lampung

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung. Penulis memilih instansi tersebut karena hanya di Satlantas Polresta Bandar Lampung yang menyediakan *excellent service* SIM *Online* yang diselenggarakan secara nasional.

D. Jenis dan Sumber data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata, dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain (Moleong, 2005: 157). Adapun menurut

Sugiyono(2010:137), data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data-data yang diperoleh dari Satlantas Polresta Bandar Lampung yang mendukung data-data primer.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *SIM Online* baik pelaksana maupun masyarakat pengguna layanan tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam wawancara tersebut diantaranya:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Kompol Indra Novianto	Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung	17 Oktober 2016
2	Aiptu Gunawan, S.H.	Aparat Pelaksana SIM <i>Online</i> Polresta Bandar Lampung	17 Oktober 2016
3	Sri Fatmawati	Masyarakat pengguna SIM Online (warga asli Bandar Lampung)	17 Oktober 2016
4	Astra Yulian	Masyarakat pengguna SIM <i>Online</i> (Warga pendatang)	17 Oktober 2016

Sumber: Diolah oleh peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).

Peneliti harus mencatat teknik yang mana kondisi dan situasi yang mana mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Sebaiknya pada waktu uji coba, digunakan *tape recorder* (Arikunto, 2007: 228).

Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari pihak-pihak terkait atau subjek penelitian tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi. Adapun pihak terkait yang penulis wawancarai diantaranya personil Satlantas Polresta Bandar Lampung meliputi Kepala Satuan, Bintara Pelaksana, Teknisi SIM *Online* serta beberapa mahasiswa dan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:135), dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang penerapan SIM *Online* oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meng-*copy* data-data yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan dan terdapat beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan (Moleong, 2007: 242).

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan implementasi atau penerapan program SIM *Onlinedi* Polresta Bandar Lampung.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Praswoto, 2011:242). Sugiyono (2009:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011:244). Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Sugiyono (2009:249), dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat lebih utuh. Berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (Bungin, 2003:70)

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Praswoto (2011:248). Pada tahap ini mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Menurut

Sugiyono (2009:252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapang.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009:253). Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji kebenaran, kekuatan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data telah dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

H. Teknik Keabsahan Data

Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:173) sebagai berikut:

1) *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Teknik pemeriksanaan yang digunakan untuk meningkatkan derajatkepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaanpada latar penelitian dan ketekunan pengamatan yang memungkinkankedalam penelitian.

2) *Transferability* (Keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3) *Dependability* (Ketergantungan)

Untuk menentukan ketergantungan data peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4) *Confirmability* (Kepastian)

Untuk menentukan kepastian data maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data, yaitu triangulasi dan ketekunan atau ketelitian pengamatan. Kedua cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi menurut Moleong (2010:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Moloeng (2010:331) menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data

- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi atau apakah observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda (Bungin, 2011:265).

2. Ketekunan Pengamatan

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan atau ketelitian pengamatan. Ketelitian pengamatan berarti mencari data secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak diperhitungkan. Ketekunan atau ketelitian pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan dengan penelaahan secara rinci.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan Keppres Nomor: 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat Pangak dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat Mabak dan ditingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat Kodak sedangkan Komando pelaksana terdapat Komando kewilayahan disingkat Kowil Lampung dibawah Kodak VI Sumatera Bagian Selatan.

Kowil Lampung membawahi beberapa Kores, diantaranya adalah Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung yang dipimpin Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang Teluk Betung.

Tabel. 4.1 Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang Teluk Betung

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	AKBP Drs. R. Siswoyo	Tahun 1969-1976
2.	Ltkol Pol. Drs. M. Zachri Amin	Tahun 1976-1978
3.	Ltkol Pol. Drs. Soentono	Tahun 1978-1979

No	Nama	Tahun Menjabat
4.	Letkol Pol. Drs. Oetomo	Tahun 1979-1980
5.	Letkol Pol Drs. Soegiono	Tahun 1980-1983
6.	Letkol Pol. Drs. Agoes Salim Djamil	Tahun 1983-1986
7.	Letkol Pol. Drs. Sjacroedin ZP.	Tahun 1986-1988
8.	Letkol Pol. Drs. Purnomo Subagio	Tahun 1988-1989
9.	Letkol Pol. Drs. Edwin Ismail	Tahun 1989-1990
10.	Letkol Pol. Drs.Syawal Hariadi	Tahun 1990-1991
11.	Letkol Pol Drs. RM. Napitupulu	Tahun 1991-1992
12.	Letkol Pol. Drs. Paiman	Tahun 1992-1994
13.	Letkol Pol Drs.JMR .Sondakh	Tahun 1994-1995
14.	Letkol Pol Drs.S. Damanhuri	Tahun 1995–1997
15.	Letkol Pol. Drs.TMB. Bagan Siahaan	Tahun 1997-2000
16.	Supt.Drs.Tri ParnoyoKartiko	Maret 2000-Des2000
17.	Kombes Pol. Drs. Bung Jono ,SH,MH	Tahun 2000-2003
18.	Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari	Tahun 2003-2005
19.	Kombes Pol Drs. H.S. Maltha, SH.Msi	Tahun 2005-2006
20.	Kombes Pol. Drs. Endang Sunjaya, SH	Tahun 2006- 2007
21.	Kombes Drs. Syauqie Achmad	Tahun 2007-2009
22.	Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijono	Tahun 2009-2010
23.	Kombes Pol. Drs. Guntor Fartio Gaffar	Tahun 2010
24.	Kombes Pol. M. Nurocman, S.I.K	Tahun2010-2013
25.	Kombes Pol. Dwi Irianto	Tahun 2013-2015
25.	Kombes Pol. Hari Nugroho, S.I.K	Tahun 2015-2016
26.	Kombes Pol. Murbani Budi Pitono, S.IK., M.Si.	Tahun 2016 sampai sekarang

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2016

Dengan adanya perubahan Polwil Lampung menjadi Polda Lampung tentunya Koresta 611 Tanjung Karang berubah menjadi Polresta Bandar Lampung. Pada tanggal 9 Agustus 2010 di Resmikan perubahan tipe Polres yaitu dari Poltabes menjadi Polresta dengan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor Polisi :Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang OTK tingkat Polda.

B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

1. Visi Polresta Bandar Lampung Tahun 2016

Mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi wilayah yang aman, selamat, tertib, lancar dalam berlalu lintas yang akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan lalu lintas, ketertiban lalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan serta tertib registrasi dan identifikasi penerbitan SIM secara on line bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Misi Polresta Bandar Lampung Tahun 2016

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai berikut :

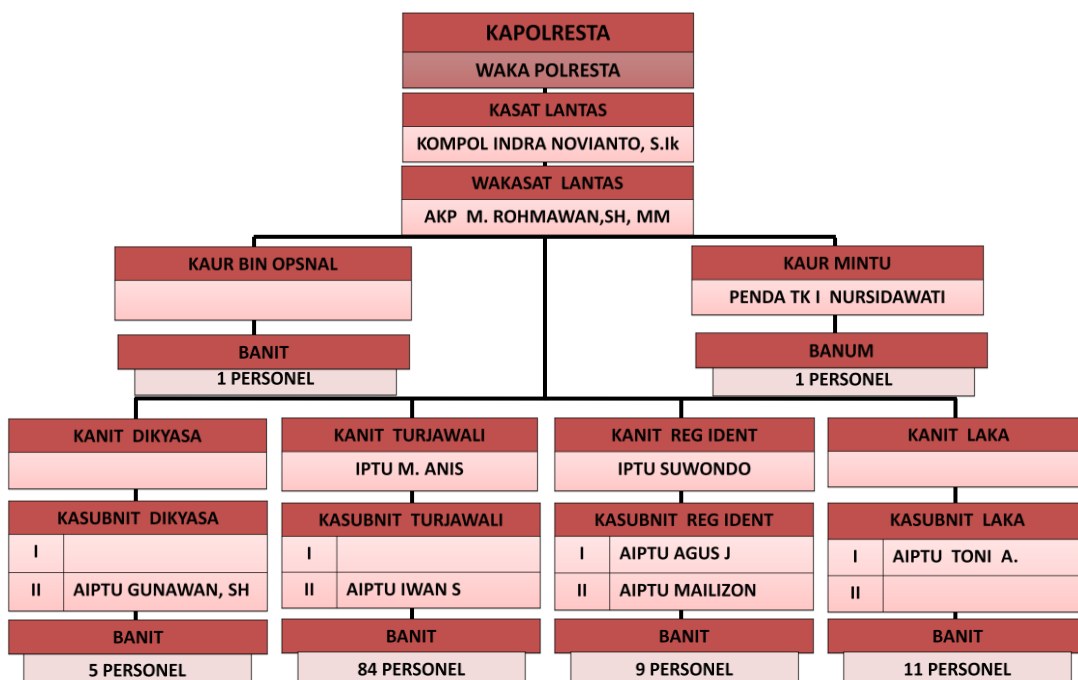
- a. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- b. Melaksanakan Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi melalui SIM Online;

- d. Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- e. Melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- f. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung

Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung khususnya di bidang Lalu Lintas, Satlantas Polresta Bandar Lampung membuat suatu struktur organisasi untuk menentukan pembagian tugas masing-masing personel. Secara detail, struktur organisasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung



Sumber : Profil Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2016

3. Tugas dan fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memiliki Tugas dan Fungsi diantaranya:

a. Tugas Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satlantas Polresta Bandar Lampung memiliki tugas pokok yaitu menyusun Program Kegiatan (Progiat) dan Rencana Kegiatan (Rengiat) dan melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas.

b. Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai :

- 1) Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian;
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi melalui SIM Online;

- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanandan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

4. Sasaran Prioritas Satuan Lalu Lintas

Sasaran Prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung diantaranya :Untuk lebih memfokuskan arah penanganan lalu lintas maka kamseltibcar tersebut diuraikan menjadi *kamsel* (Keamanan dan Keselamatan) dan *tibcar*(Ketertiban dan Kelancaran) lantans, dimana *kamsel* lebih menitik beratkan kepada upaya menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas dan *tibcar* kepada upaya untuk menangani kesemrawutan, kemacetan dan tertib dalam berlalu lintas. Sasaran prioritas Satuan Lalu Lintas :

a. Bidang kamsel (Keamanan dan Keselamatan)

Pada bidang keamanan dan keselamatan tersebut tertuju pada bagaimana upaya/program satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mengurangi dan menekan jumlah laka baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang meliputi:

1. Dikmas lalu lintas

Sat Lantas Polresta Bandar Lampung mencanangkan kepedulian kepada tertib di jalan raya, yang mana menanamkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk berlaku tertib, sopan dan santun dalam berlalu lintas, khususnya kepada anak usia dini dan anak-anak sekolah

2. Rekayasa Lalu Lintas dan Survey Jalan

Melakukan rekayasa lalu lintas dalam forum lalu lintas dan angkutan yang merupakan wadah untuk mengkoordinasikan masalah dan penanganan berbagai masalah lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini berkaitan dengan masalah lalu lintas yang terjadi di kota Bandar Lampung sangat kompleks sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan memerlukan *Commitment Will* dari semua pihak. Serta menjadikan semua pihak dapat berperan aktif sebagai wujud dari *civil society* (masyarakat madani) sehingga terwujud rasa kebersamaan antara Polri, Instansi terkait yang berkompeten, organisasi bidang otomotif, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pengguna jalan secara umum dalam menangani permasalahan lalu lintas dan dapat diambil solusi yang cepat dan akurat karena adanya keterlibatan secara langsung oleh badan, instansi, organisasi dan masyarakat pengguna jalan yang berkompeten dibidangnya.

3. SP3KM (Satu Polisi setiap 3 km)

b. Bidang Tibcar (Ketertiban dan Kelancaran)

Sesuai dengan karakteristik daerah Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi Lampung dan penyangga pintu masuk pulau Sumatera maka program penanganan lalu lintas lebih dititik beratkan pada program tibcar lintas.

1. Optimalisasi satuan tugas khusus/*team speed*.

Penjabaran Program Akselerasi fungsi lalu lintas Sat Lintas Polresta Bandar Lampung dan jajarannya merupakan tindak lanjut Program Akselerasi Transformasi Polri (RBP, Quick Wins, GNIB dan RSPA) serta 10 Program

Kapolri sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas yang merupakan fungsi pelayanan Polri dalam upaya memberikan pelayanan lalu lintas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dengan standar nasional, sehingga diharapkan menuju Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat. Program *Quick Wins* dan 10 Program Kapolri merupakan program unggulan menuju Polri yg Mandiri, Profesional Dan Dipercaya Masyarakat. menghadirkan 4 layanan utama diantaranya yakni *Quick Response* kecepatan dalam menindak lanjuti permasalahan lalu lintas khususnya masalah kemacetan dan kesemrawutan.

Guna mewujudkan program *Quick Response* tersebut Satlantas Polresta Bandar Lampung telah membentuk satuan tugas khusus (*team speed*), dimana tugas yang diembannya adalah cepat dalam bertindak untuk mengurai setiap kemacetan dengan melakukan pengaturan ataupun melakukan penindakan terhadap penyebab kemacetan yang timbul seperti parkir sembarangan, melawan arus dan lain-lain.

Satuan tugas khusus/*team speed* beranggotakan 18 (delapan belas) orang yang dilengkapi dengan kendaraan dinas roda dua

2. Revitalisasi KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) dengan penegakan hukum.

Menentukan penggal-penggal jalan tertentu untuk ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) merupakan proyek percontohan dari daerah yang semrawut menjadi daerah yang tertib dan teratur. Khusus untuk Polresta bandar lampung telah ditetapkan beberapa penggal jalan sebagai KTL yaitu Jalan Sudirman, Jalan Ahmad

Yani, Jalan Kartini dan Jalan Raden Intan. Untuk mengefektifkan KTL tersebut dilaksanakan dengan cara penjagaan pada titik-titik tertentu oleh regu patroli dan patroli rutin oleh satuan tugas khusus/*team speed* yang dilaksanakan rutin pada jam-jam tertentu bila ditemukan pelanggaran lalu lintas misal; becak/ran yang melawan arus, kendaraan yang parkir dibadan jalan, PKL yang berdagang di badang jalan sehingga mengakibatkan kesemrawutan maka akan dilakukan upaya-upaya:

- a. Melakukan peneguran ataupun penindakan dengan blanko tilang untuk kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Pol PP dan Dinas Pasar Kota Bandar Lampung) untuk bersama-sama melakukan penertiban terhadap PKL yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.
 - c. Penertiban pejalan kaki untuk menggunakan jembatan penyeberangan jalan.
3. Penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, travel gelap, balapan liar dan angkot yang tidak tertib.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Polresta Bandar Lampung memprioritaskan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran yang kasat mata, contohnya: tidak menggunakan helm, bonceng tiga, kendaraan yang tidak menggunakan TNKB sesuai ketentuan dan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengganggu kenyamanan masyarakat (knalpot racing). Kegiatan ini di prioritaskan pada

kawasan KTL yang telah ditetapkan (Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini dan Jalan Raden Intan).

Sat Lantas Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Sat Intel Kam Polresta Bandar Lampung melakukan penertiban dan telah berjalan terhadap kendaraan travel gelap, dilakukan penilangan dengan menyita kendaraan yang digunakan untuk travel gelap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. Lokasi yang menjadi sasaran team ini adalah : Barunaria Jalan Soekarno Hatta-Jalan Yos Sudarso dan Tugu Raden Intan Jalan Soekarno Hatta-Jalan ZA Pagar Alam. Begitu juga dengan knalpot *racing* penilangan dengan menyita kendaraan, kendaraan dapat diambil dengan ketentuan mengganti kenalpot standar serta melengkapi semua kelengkapan kendaraan bermotor yang ada padanya.

Guna menindak-lanjuti banyaknya pengaduan masyarakat tentang adanya balapan liar di jalan Sultan Agung yang mengganggu ketentraman warga sekitar dan sangat rentan terjadi kecelakaan, maka Sat Lantas Polresta Bandar Lampung berkoordinasi dengan Sat Samapta dan jajaran Polsek Polresta Bandar Lampung memprogramkan kegiatan penindakan terhadap balapan liar tersebut. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu malam Minggu dimana pada waktu tersebut sering dimanfaatkan untuk balapan liar.

Kendaraan bermotor roda dua yang terjaring karena melakukan balap liar diadakan penilangan dengan menyita kendaraannya selama 1 (satu) bulan dan wajib mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku balap liar.

4. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya program kegiatan penegakkan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri khususnya pada pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan dengan *system* patroli ataupun razia rutin dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung belum berjalan maksimal sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin disini terlaksana secara bertahap mulai dari pimpinan pelaksana kepada aparat pelaksana lalu berlanjut ke masyarakat. Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a. Pada indikator transmisi, penyaluran informasi tentang pelaksanaan program SIM *Online* sudah terlaksana dengan baik. Penyaluran informasi dilakukan dari pimpinan pelaksana kepada aparat pelaksana kebijakan melalui surat telegram dan rapat internal.
- b. Pada indikator kejelasan, informasi yang terdapat pada pelaksanaan program SIM *Online* sudah cukup memadai namun hanya terbatas kepada aparat pelaksana, sedangkan kejelasan informasi dari aparat pelaksana kepada

masyarakat masih belum memadai. Kejelasan informasi merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan mengenai detail prosedur dan sistem yang ada pada pelaksanaan program *SIM Online* harus disampaikan dengan jelas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

- c. Pada indikator konsistensi, komunikasi yang terjalin sudah konsisten namun masih kurang memadai karena informasi yang diberikan oleh aparat pelaksana belum mencakup tentang *SIM Online* tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program *SIM Online* tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam Implementasi Program *SIM Online* pada Polresta Bandar Lampung dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada yaitu:

- a. Sumber daya manusia (*staff*) yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan program *SIM Online* sudah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia yang memadai dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program *SIM Online* tersebut.
- b. Pada indikator sumber daya non manusia, pemberian fasilitas kepada aparat pelaksana yaitu Satlantas Polresta Lampung sudah terealisasi dengan baik. Sarana-prasarana tersebut ditujukan agar pelaksanaan program *SIM Online* tersebut bisa berjalan dengan efektif.

3. Disposisi

Disposisi dalam Implementasi Program *SIM Online* pada Polresta Bandar Lampung sudah cukup baik. Kecenderungan sikap aparat pelaksana dalam pelaksanaan program *SIM Online* tersebut dipantau oleh kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung dengan pimpinan pelaksana yaitu Kasat Lantas

sehingga dapat mencegah kecenderungan perilaku yang tidak sesuai dengan perintah pimpinan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan SIM secara *Online* dilakukan secara terpusat ke server Korlantas Polri sehingga aparat pelaksana tidak dapat memanipulasi data pelayanan SIM *Online* tersebut. kecenderungan sikap pelaksana yang baik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program SIM *Online*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung dapat dilihat melalui indikator-indikator yang ada sebagai berikut:

- a. Pada indikator *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam pelaksanaan program SIM *Online* ini sudah tersedia dengan baik. Aparat pelaksana telah melaksanakan pelayanan SIM *Online* tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di lapangan, sehingga pelaksanaan program SIM *Online* tersebut berjalan secara terstruktur dan sistematis.
- b. Pada indikator fragmentasi dalam Implementasi Program SIM *Online* pada Polresta Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terjalannya koordinasi dan pembagian tugas antara Satlantas Polresta Bandar Lampung dengan instansi pendukung seperti Kemendagri, Bank BRI, dan PT. Telkom. Namun masih terdapat kendala dalam fragmentasi tersebut yaitu terbatasnya jumlah data pemohon pada *database* yang dimiliki Kemendagri sehingga memperlama waktu yang dibutuhkan pemohon dalam pelayanan SIM *Online* tersebut. koordinasi dalam sebuah implementasi program sangat dibutuhkan agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi dilapangan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga masalah inti yang menghambat pelaksanaan *SIM Online* secara efektif yaitu gangguan jaringan, data pemohon yang belum ter-update di server Kemendagri dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya *SIM Online* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya peningkatan pemeliharaan jaringan internet yang digunakan oleh Polresta Bandar Lampung secara berkala agar tidak menjadi penghambat dalam pelayanan *SIM Online* tersebut di kemudian hari. Koordinasi dengan pihak yang terkait mengenai permasalahan jaringan harus terus dilakukan sehingga pelaksanaan program *SIM Online* yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung tersebut menjadi efektif.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program *SIM Online* sehingga masyarakat terutama warga pendatang bisa dengan mudah membuat atau memperpanjang SIM mereka tanpa harus kembali ke daerah asal mereka.
3. Pola koordinasi dengan Kemendagri perlu ditingkatkan agar memaksimalkan data E-KTP yang terdapat di *database* Kemendagri sehingga pada pelaksanaan pelayanan *SIM Online* tidak memakan waktu yang lama dikarenakan aparat pelaksana harus menginput manual data pemohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto. 2002. *Proses Penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Goode, William J. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Alih Bahasa oleh Sahat Simamora, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Hill, Michael (ed). 1997. *The Policy Process: A Reader*. Second Edition. London: Prentice Hall
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6. London: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- _____. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta. Elex Media Komputindo
- _____. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo
- _____. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan–Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:CV.Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:CV.Alfabeta
- Suhardi & Sunarti S. (2009). *Sosiologi 2*. Bandung: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: kajian proses dan analisa kebijakan*. UNY Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI)

_____. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta
:MediaPressindo (Anggota IKAPI)

Website

- <http://mulyono.staff.uns.ac.id/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 20.30
- lampung.tribunnews.com/2015/12/03/pembuatan-sim-online- sementara-hanya-berlaku-bagi-warga-bandar-lampung Diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 15.00 WIB
- <http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223> Diakses pada tanggal 28 Juli 2016 Pukul 19.00 WIB).
- <http://www.saibumi.com/artikel-70970-pelayanan-sim-online-setiap-hari-di-mobil-keliling-hanya-50-pemohon.html> Diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 15.10 WIB

Sumber lain

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan